

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kesiapan aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB), serta mengidentifikasi berbagai kendala utama yang menghambat proses pengembangan kualitas SDM di lingkungan tersebut. Melalui tujuan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat fondasi pemerintahan di wilayah Papua Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci di bidang pengelolaan SDM, observasi partisipatif langsung terhadap aktivitas kebijakan, serta studi dokumentasi terhadap struktur organisasi dan manajemen kepegawaian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai profil serta kapasitas kesiapan aparatur di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan SDM di BKPSDM Provinsi Papua Selatan secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari kompetensi manajerial yang mulai terbentuk serta penerapan budaya kepemimpinan partisipatif yang efektif dalam meningkatkan komitmen pegawai. Selain itu, struktur organisasi telah didesain sedemikian rupa dengan mengacu pada prinsip *merit system* guna mendukung alur kerja yang transparan dan akuntabel dalam birokrasi pemerintahan daerah yang baru.

Meskipun terdapat kemajuan, penelitian ini menemukan tantangan signifikan berupa adanya kesenjangan kompetensi (*competency gap*) antara level pimpinan dan pelaksana, serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi. Kendala infrastruktur seperti stabilitas jaringan internet dan partisipasi masyarakat yang masih bersifat semu (*pseudo-participation*) juga menjadi hambatan serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merata serta peningkatan infrastruktur digital menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Provinsi Papua Selatan.



**KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN (Studi kasus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan)**

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

SUCI PASKA M.Y. RAHALUS, Dr. Ratminto, M.Pol, Admin

**Kata Kunci:** Kesiapan SDM, Tata Kelola Pemerintahan, Daerah Otonomi Baru, BKPSDM, Papua Selatan.